

BAB II

DINAMIKA KONTRADIKSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI DENGAN KEPENTINGAN NATO.

Pada bab ini difokuskan pada penjelasan terhadap bentuk kebijakan dan kepentingan antara Turki dan NATO dalam dinamika hubungan kerjasama mereka. Penulis akan memberikan gambaran tentang bentuk kebijakan luar negeri yang diambil oleh Erdogan sebagai presiden Turki dalam langkah-langkah memenuhi kepentingan kebijakan luar negeri Turki baik di ranah regional maupun global. Sebagai salah satu negara aliansi, Turki memiliki *bargaining power* berupa kondisi geostrategis yang akan menunjang Turki dalam pergerakan dan pengambilan kebijakan luar negerinya terhadap dinamika hubungan internasional. Dengan begitu NATO melihat hal tersebut sebagai salah satu keuntungan mereka menjadikan Turki sebagai salah satu negara aliansi mereka.

Oleh karena itu, penulis menjelaskan orientasi kebijakan yang berlangsung pada hubungan kerjasama Turki dan NATO. Orientasi kebijakan akan sangat menentukan pada bagaimana arah kebijakan suatu negara, mengingat bahwa Turki merupakan negara yang terletak diantara dua benua Eurasia (Eropa dan Asia) menyebabkan kepentingan antara Turki dan NATO terbentuk sejak masa perang dingin . Kemudian, pada bagian kedua penelitian ini menjeskan tentang bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Erdogan sejak era dia memimpin. Hal ini dikarenakan arah perubahan kebijakan suatu negara salah satu faktornya yakni disebabkan oleh pemimpin negara. Lalu kemudian bagian

terakhir pada bab ini akan menguraikan lebih detail terkait dengan kebijakan luar negeri Turki terhadap kepentingan NATO. Dengan begitu, ketiga bagian tersebut di elaborasikan secara empiris menggunakan data yang faktual untuk menciptakan penelitian yang kompeten.

2.1 Orientasi Hubungan Kerjasama Turki Sebagai Anggota NATO.

Pada masa pasca kekaisaran Ottoman, Turki di bawah kepemimpinan Kemal Atatürk menjalani transformasi yang signifikan menuju modernisasi dan sekularisasi. Selama periode ini, Turki mulai memperhatikan hubungan dengan negara-negara Barat sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat posisinya dalam geopolitik global yang terus berubah (Kili, 1980).

Perubahan strategis Turki dari orientasi Timur ke arah Barat semakin terwujud seiring dengan kesadaran akan pentingnya integrasi dengan dunia Barat untuk mengamankan masa depan negara. Kepentingan Turki dalam memperkuat hubungan dengan NATO tidak hanya didasarkan pada aspek keamanan, tetapi juga pada keinginan untuk mengakses teknologi militer dan dukungan politik yang dapat membantu modernisasi dan keamanan dalam negeri (Peimani, 1998). Proses bergabungnya Turki ke dalam NATO menjadi tonggak penting dalam sejarah negara ini. Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen Turki terhadap keamanan kolektif dan nilai-nilai Barat, tetapi juga membawa implikasi besar terhadap dinamika politik dan keamanan di kawasan tersebut. Dengan bergabungnya Turki ke dalam aliansi militer Barat, Turki menjadi elemen penting dalam pertahanan kolektif NATO,

memberikan kontribusi signifikan dalam kapasitas militer, dan memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam menjaga stabilitas regional dan global (Oryzly & Dal, 2013).

Masa perang dingin menjadi masa yang cukup krusial untuk tiap regional dalam memperkuat keamanannya. Dalam hal ini NATO sebagai organisasi yang didirikan pada tanggal 4 April 1949 menjadi organisasi keamanan kolektif dalam melawan pengaruh Uni Soviet (Karagiannis, 2012). Sejak berdirinya NATO anggota - anggota pendirinya memiliki tujuan penting dan abadi yaitu menjaga kebebasan dan keamanan semua anggotanya dengan menggunakan cara politik maupun militer. NATO sendiri memiliki nilai-nilai dasar seperti kebebasan individu, demokrasi, hak asasi manusia, serta supremasi hukum. Bahkan ketika keamanan negara anggota mendapat ancaman dari entitas tertentu, maka semua anggota akan berkumpul dan membahas dengan pasal perjanjian yang terdapat didalam NATO yaitu, Pasal 4; ketika keamanan negara anggota terancam, semua pihak akan berkonsultasi bersama setiap kali, menurut pendapat salah satu dari mereka, integritas teritorial, kemerdekaan politik, atau keamanan salah satu pihak terancam (NATO, 2022).

Keamanan sendiri merupakan kebutuhan penting bagi tiap negara maupun individu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan syarat penting bagi perubahan masyarakat yang dinamis (Buzan & Wæver, 2003). Dalam dunia hubungan internasional, pertahanan diri tiap negara tidak cukup untuk mengamankan perdamaian regional ataupun global. Maka dari itu,

diperlukan kerjasama dalam berbagai bentuk organisasi. NATO, yang saat ini berdiri adalah bentuk dari respon terhadap bentuk dinamika keamanan internasional. NATO menggunakan Hubungan dan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budayanya dalam bentuk tambahan dari kekuatan militernya.

Singkatnya kondisi tiap negara perlu diperhitungkan dalam menjalin sebuah hubungan yang akan menunjukkan arah strategis kerjasama yang terbentuk oleh tiap regionalnya (Mackinder, 2014). Turki menjadi salah satu sorotan bagi NATO terutama AS dalam menjalani hubungan kerjasamanya. Sejak era kepemimpinan Kemal Ataturk Turki sudah mulai menunjukkan kencondangannya dalam hubungan politis terhadap negara negara barat. Dengan perubahan sekulerisme yang dibawakan oleh Kemal, tentu membuat negara barat seperti AS melirik Turki menjadi potensi unggul dalam kerjasama regional.

2.1.1 Kepentingan Turki Bergabung Sebagai Anggota NATO.

Turki bergabung sebagai aliansi NATO pada 18 februari pada tahun 1952 hal ini disebabkan oleh adanya ancaman Soviet selama Perang Dingin dan persetujuan kedua belah pihak pada persyaratan tersebut. Tidak hanya itu saja, penting untuk diingat bahwa tingkat ketegangan yang dimiliki AS dan Soviet di masa itu sangatlah tinggi intensitasnya. Sehingga membuat kedua negara adidaya tersebut saling meningkatkan pengaruh pengaruh doktrinnya, doktrin Truman, sampai dengan partisipasi Turki pada perang Korea dengan jumlah tentara sebanyak 5.000 pasukan yang diperkuat dengan akses Turki terhadap

NATO. Menurut Aybet membagi kerjasama Turki dengan NATO ke dalam tiga fase: pertama, masa “pertahanan kolektif yang dominan bagi Turki dan NATO” lalu yang kedua, kepentingan bersama yang dilakukan untuk “keamanan kolektif”, dan terakhir “keterlibatan Turki sebagai mitra strategis bagi NATO dibidang geostrategis” (Aybet, 2000).

Di masa kepemimpinan Celal Bayer, Turki mampu mengambil perannya sebagai anggota aliansi baru di NATO terhadap ancaman yang terjadi di wilayah perbatasan. Setelah berakhirnya perang dunia kedua, Soviet berniat menguasai dan mengambil selat Turki sebagai akses utama jalur dari Laut Hitam ke laut Mideterania sehingga pada tanggal 7 agustus 1946 terjadi krisis di selat turki (Carter, 2014). Hal ini menjadi motif pendorong bagi Turki pada saat itu untuk segera mendekatkan diri ke Barat yaitu NATO secara politik. Kemudian memasuki perang dingin George Washington membentuk sebuah tim gabungan militer yang dirancang untuk melakukan pelatihan, mempersiapkan peralatan dan merencanakan pembangunan guna membantu kepentingan situasi geografis Turki (Outzen, 2012, 2). Pada fase inilah dapat dikatakan merupakan fase yang dapat disebut sebagai “pertahanan kolektif”. Pemilihan keputusan Turki untuk mengamankan wilayahnya dari pengaruh soviet pada saat itu dengan beraliansi pada NATO atau barat, sekaligus membendung pengaruh komunis di wilayah Eropa Timur.

Memasuki tahun 1990-an kerjasama aliansi di NATO memunculkan gagasan yang cukup kuat mengingat bahwa eksistensi dari organisasi pakta pertahanan ini masih bertahan selama kurun waktu 40 tahunan pada saat itu.

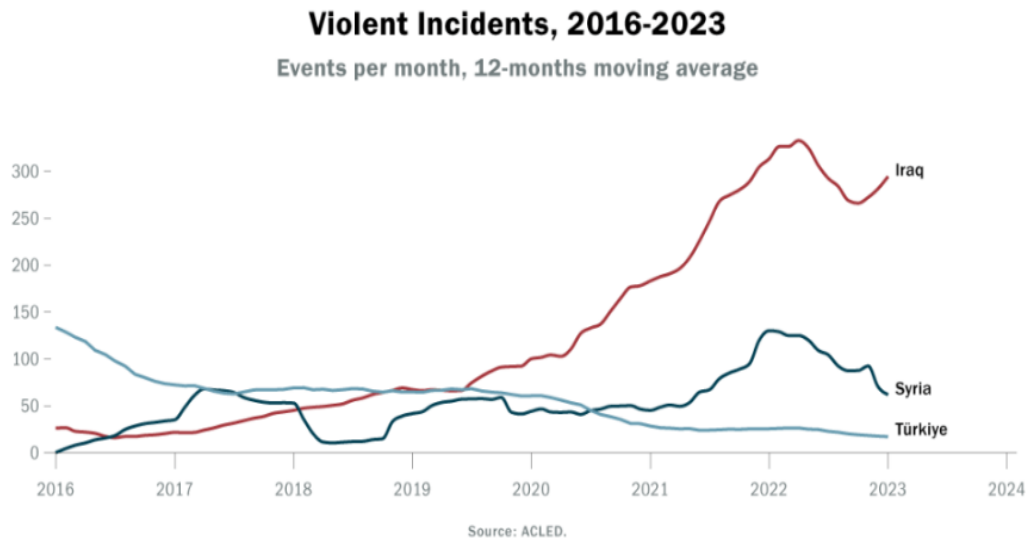
Seperti yang digambarkan oleh Deutsch dalam teorinya mengenai “*security community*” (Ulusoy, 2012). Konteks teori ini mengatakan bahwa sekelompok negara akan melindungi dan menjaga hubungan dengan negara regional dengan ketat sehingga nanti akan ada jaminan nyata bahwa “sesama negara anggota tidak akan saling berperang dan menyerang, namun akan menyelesaikan masalah dengan cara preventif”. Dengan hal demikian yang membuat hubungan kerjasama keamanan NATO menjadi lebih kuat dan mampu berlanjut hingga runtuhnya Uni Soviet pada saat itu (Aybet, 2000). Dengan begitu, hubungan kerjasama Turki – NATO memasuki era baru yaitu dengan mengubah strateginya dari “pertahanan kolektif” menjadi “keamanan kolektif”. Pada fase ini adalah bentuk dari adaptasi kerjasama dengan lingkungan internasional yang baru. Hal inilah yang menyebabkan Turki mendapatkan posisi yang menguntungkan dan penting, contohnya pada saat Turki gagal untuk berkembang menjadi “kekuatan regional”, namun negara barat malah mendukung dan mengakui kekuatan Turki dengan hubungan kerjasama yang dilakukan.

Dengan begitu, hubungan kerjasama antara Turki dengan NATO meningkat secara signifikan dan menjadikan Turki sebagai anggota aliansi yang strategis bagi NATO. Pada kondisi ini dapat dikatakan Turki memasuki fase “keterlibatan mitra yang strategis” (Aybet, 2012), hal ini disebabkan berbagai agenda yang dijalankan NATO pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an awal banyak melibatkan Turki sebagai aliansi yang strategis. Contoh-contoh yang dapat ditunjukkan yaitu NATO di Bosnia dan Herzegovina, Afghanistan,

hingga Kosovo. Keterlibatan itu semua yang nantinya akan diperlihatkan sebagai bentuk dari kontribusi Turki terhadap NATO.

2.1.2 Kontribusi Turki terhadap NATO.

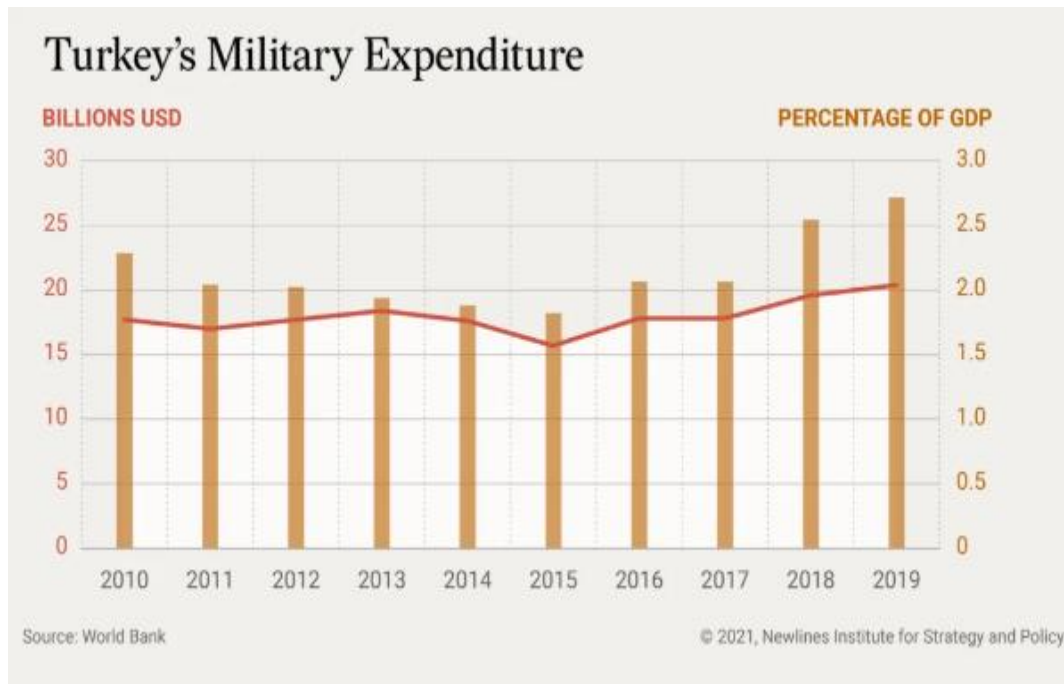
Salah satu kunci strategis Turki terletak pada kondisi geografis yang dimilikinya. Dengan berfokus pada struktur lokasi Turki dan kekuatan militer yang dimiliki tentu ini akan dapat menjadi fungsi politik keamanan yang kuat bagi NATO (Ludger Kuhnhardt, 2019). Selama lebih dari setengah abad Turki menjadi anggota NATO ia telah memberikan catatan historis yang baik yakni memiliki angkatan militer terbesar kedua di NATO. Menurut data Turki pada tahun 2021 telah menghabiskan 13 USD miliar untuk NATO (NATO,2022). Dengan angka tersebut, Turki menduduki 10 besar sebagai negara aliansi NATO yang berkontribusi banyak terhadap NATO, secara tidak langsung Turki juga berupaya dalam kepastian keamanan nasionalnya dengan memerangi organisasi-organisasi teroris yang saat ini masih eksis. Walaupun disisi lain banyak negara anggota NATO lainnya yang masih meragukan hubungan kerjasamanya dengan Turki dikarenakan identitas yang dimiliki oleh Turki sebagai negara Muslim terbesar di Eropa. Hal tersebut tidak menyurutkan Turki dalam menjaga keamanan Regionalnya dari organisasi ekstrimis seperti Partai Pekerja Kurdistan (PKK), Yekineyen Parastinam, Organisasi Teror Fethullah Gulen (FETO), sampai dengan ISIS (Özlük & Özlük, 2014).



Gambar 2.1 Data Kekerasan Wilayah Turki, Syria, dan Iraq

Source : ACLED

Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa tingkat kekerasan yang dialami 3 negara tersebut menunjukkan kontras yang berbeda, dimana ketiga negara tersebut sama sama memiliki penduduk asli Kurdistan yang membentuk partai buruh Kurdistan atau biasa disingkat dengan PKK. Tingkat kekerasan secara bertahap menurun dari tahun ke tahun di wilayah negara Turki secara bertahap sedangkan di kedua wilayah negara lain justru sebaliknya makin meningkat dari tahun ke tahun, penurunan tingkat ini kekerasan di Turki ini secara drastis terjadi pada tahun 2019 (ACLED, 2019). Hal ini selaras dengan kondisi militer yang dialami pada tahun 2019 mengalami sebuah peningkatan yang signifikan pada pengeluaran anggaran militer negara Turki.



Gambar 2.2 Data Pengeluaran Anggaran Militer Negara Turki 2010-2019

Source : World Bank, Newlines Institute for Strategy and Policy

Dapat dilihat pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa di tahun 2019 Turki mengalami peningkatan yang signifikan terhadap biaya anggaran militernya. Dengan begitu hal ini membuktikan bahwa Turki berhasil memfokuskan negaranya pada bidang militer terutama pada keamanan regionalnya dan hal ini secara tidak langsung memberikan kontribusi besar bagi NATO dan negara aliansinya terhadap ancaman regional yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Turki (Statista, 2021).

Turki berupaya memastikan keamanan nasionalnya sambil terus melawan organisasi-organisasi terrorism, yang kerap kali eksis di wilayah tersebut seperti, PKK (Partai buruh Kurdistan), Organisasi Teror Fethullah Gulen (FETO), ISIS, dan lain lain (Iletişim Başkanlığı, 2022). Selain itu, Turki

juga berusaha mempromosikan perdamaian dengan tujuan menjaga stabilitas regional dan global. Dengan kontribusi yang dilakukan Turki kepada wilayah regional dalam mengatasi ancaman terorisme ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada hubungan kerjasamanya dengan NATO.

Dalam beberapa misi NATO, Turki memberikan dukungannya berupa personal, alat militer hingga pasukan operasi di berbagai wilayah seperti Operasi Kosovo, Misi ALTHEA di Bosnia hingga keamanan wilayah di selat Bosphorus serta laut Aegea (Loudermilk, 2017). Di lain sisi, tidak hanya di bidang kekuatan militer saja melainkan dibidang *geostrategic* juga Turki menjadi penyangga bagi NATO terutama di wilayah Eropa Timur. Pada lokasi tersebut menjadi ancaman imigrasi ilegal dari negara-negara yang berkonflik. Dengan memanfaatkan posisinya Turki memainkan perannya terhadap hal tersebut sebagai aktor organisasi NATO dalam menjaga stabilitas dan penanggulangan terhadap masalah seperti perdagangan manusia, hingga penyelundupan narkoba di wilayah yang rentan tersebut (MFA.gov.tr, 2022). Upaya peningkatan keamanan militer Turki ini menjadikannya sebagai salah satu negara penyumbang kekuatan militer terbesar di NATO.

2.2 Kebijakan Luar Negeri Turki di Era Kepemimpinan Erdogan.

Sejak Recep Tayyip Erdogan menjadi Presiden Turki pada tahun 2014, dan khususnya sejak upaya kudeta militer pada tanggal 15 Juli 2016, kebijakan luar negeri Turki tampaknya telah mengalami perubahan. Setidaknya ada tiga hal yang terlihat jelas dalam gambaran ini. Telah terjadi pemulihan hubungan

yang nyata antara Turki dan negara-negara Timur, terutama Rusia (Doğan, 2022). Pada saat yang sama, Turki dan banyak sekutu Baratnya kurang begitu dekat, yang mengakibatkan konflik dan krisis diplomatik yang berulang. Memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO menjadi sorotan utama dalam konteks ini. Akhirnya, Ankara telah mengambil peran yang jauh lebih independen dan proaktif di lingkungan Timur Tengahnya sendiri, termasuk pengerahan pasukan militer ke Suriah dan Irak. Perkembangan-perkembangan ini telah meningkatkan perdebatan yang sedang berlangsung mengenai apakah perubahan yang lebih mendasar sedang terjadi dalam kebijakan luar negeri Turki (Hale, 1992).

Kebijakan luar negeri Turki juga memiliki asas dan prinsip yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam menentukan keputusan kebijakan luar negeri itu sendiri. Meskipun kondisi hubungan diplomatik Turki dengan negara-negara Barat terlihat renggang, hal tersebut dijadikan sebuah alasan bagi sosok Erdogan dalam memimpin Turki. Ia tetap berupaya memaksimalkan perannya sebagai sosok pemimpin dan Turki sebagai sosok anggota NATO yang berada di kawasan yang strategis. Sehingga beberapa penerapan kebijakan luar negeri Turki memerlukan pemetaan yang strategis terhadap bagaimana peran Turki menjalankan Hubungan kerjasamanya yang sudah tidak lagi berporos pada satu kubu melainkan dapat menjadi negara yang independen ditengah kekuatan Unipolar negara barat (Serfaty, 2011).

2.2.1 Landasan Dasar Kebijakan Luar Negeri Turki “*Peace at Home, Peace in World*”.

Turki merupakan negara yang memiliki kondisi geografis dan kependudukan yang sangat kompleks. Melihat lokasi Turki yang diapit oleh 2 benua besar yakni Eurasia (Eropa & Asia), menjadikan negara ini sebagai negara yang cukup rentan terhadap sebuah konflik. Sejak kepemimpinan Atatürk Turki bertekad ingin mencapai sebuah moto dalam bernegara dan berhubungan dengan masyarakat internasional (Dai, 2005). Gagasan prinsip kebijakan luar negeri Republik Turki yaitu “*Peace at Home, Peace in World*” (Atatürk, 1981). Atatürk, yang telah mengikuti perkembangan internasional, diplomasi, dan kebijakan luar negeri sejak masa mudanya, menyadari bahwa Republik Turki, yang ia impikan untuk didirikan, hanya akan dapat mengambil tempat yang selayaknya di antara bangsa-bangsa modern (Azak, 2010). Dengan kebijakan luar negeri yang efektif dan hubungan luar negeri yang didasarkan pada fondasi yang kuat. Untuk alasan ini, kebijakan luar negeri dan posisi Turki di kancah internasional selalu menjadi prioritas utama Atatürk. Dia percaya bahwa masa depan Turki bergantung pada visi yang kuat dan kebijakan yang tegas untuk mencapai tujuan tersebut (Tanıyıcı, 2003).

Pengimplementasian prinsip "*Peace at Home, Peace in World*" telah berhasil dilakukan oleh Turki dari masa kepemimpinan Atatürk hingga Erdogan saat ini. Bukti nyata yang dapat ditunjukkan yaitu terletak pada kebijakn luar negeri Turki yang mencoba menjamin keamanan dan

kekuarangan dalam negeri melalui pendekatan yang berbasis peacemaking dan diplomasi. Sejarah pada penadatangan *Lausanne Peace Treaty* memperkuat arah Turki dalam melakukannya di ranah internasional setelah masa perang dunia pertama. Turki menerapkan kebijakan "*peace at home, peace in world*" dalam hubungan internasionalnya dengan cara mengembangkan hubungan yang baik dengan negara-negara di sekitarnya dan di luar negeri. Turki telah menggunakan pendekatan diplomasi dan pendekatan yang berdasarkan konvensi untuk mempertahankan keamanan dan kekurangan dalam negeri (Yilmaz, 2005).

Kebijakan luar negeri Turki telah menuntun negara ini lebih condong terhadap barat sehingga, kesempatan ini juga dapat digunakan bagi negara barat dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Turki dari berbagai bidang yakni ekonomi, militer, dan sebagainya (Güney & Karatekelioğlu, 2005). Dengan bergabungnya Turki kedalam NATO tentu membuat negara ini perlu mengkooperasikan kebijakan-kebijakan negara dengan negara-negara barat. Singkatnya keberhasilan Turki dalam mengintegrasikan diri dengan negara barat menjadi sebuah kekuatan baru dan penguatan Turki terhadap prinsip kebijakan luar negerinya.

Oleh karena itu, jika kita melihat kebijakan luar negeri Turki dari perspektif historis, tujuan utama kebijakan luar negeri Turki setelah Perang Kemerdekaan adalah untuk membuktikan bahwa Turki adalah negara yang eksis dan tidak dapat diremehkan. Secara khusus, Turki bergerak lebih dekat

ke Barat sesuai dengan prinsip-prinsip Atatürk. " *Peace at Home, Peace in World* " adalah kekuatan pendorong utama kebijakan luar negeri Turki saat itu. Dapat dikatakan bahwa sumber dari " *Zero Problems With Neighbors* " adalah pemahaman yang sama tentang kepentingan dan tujuan (Coşkun, 2015). Hingga masa AKP, Turki selalu menjalankan kebijakan pro-perdamaian terhadap musuh utamanya, Yunani. Namun, Turki tidak hanya tetap bergantung pada Barat dalam kebijakan luar negerinya, yang bertujuan untuk integritas teritorial setelah Perang Kemerdekaan, tetapi juga mengejar kebijakan perdamaian di wilayah tersebut (Ayata, 2014).

2.2.2 Kedalaman Strategis Erdogan Terhadap Kebijakan Luar Negeri Turki.

Kedalaman strategis yang dimiliki Turki adalah bagian dari jantung pemikiran politik luar negeri Turki di Era kepemimpinan Erdogan saat ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kebijakan luar negeri Turki di era AKP lebih merujuk pada system kebijakan multidimensional yang tidak hanya berporos pada salah satu zona saja namun dapat bergerak secara fleksibel. Selain itu, letak lokasi serta historis kawasan Turki juga menjadi acuan pada konsep kedalaman strategis Turki (Öniş & Yılmaz, 2009).

Penerapan kebijakan yang di era Recep Tayyip Erdogan ini menjadi tujuan baru bagi pemerintahan Turki di ranah regional sejak 2014. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa landasan dasar dari kebijakan Turki masih terletak pada prinsip " *Peace at Home, Peace in World* "

yang dijadikan sebagai rujukan dasar bagi kebijakan luar negeri Turki. Karakteristik mendasar pada politik di era kepemimpinan Erdogan sangat multidimensional dan tidak berpaku dengan satu poros saja (Saraçoğlu & Demirkol, 2014). Dengan kemunculan “*Strategic depth*” sejak 2001 dimana konsep ini dikembangkan oleh salah satu partner politik Erdogan yakni Ahmet Davutoglu, yang nantinya menjadi salah satu perdana menteri di era kepemimpinan Erdogan sebagai presiden Turki. Asumsi – asumsi dasar yang dimiliki dalam konsep *Strategic depth* ini sangat relevan pada tujuan pendekatan politik internasional Turki dalam menjalin hubungan kerjasama (Murinson, 2006).

Terdapat tiga hal mendasar yang disampaikan oleh Ahmet Davutoglu dalam konsep *strategic depth* yaitu, diantaranya :

1. *Contemplative causes* ; sifat ini digunakan dalam melihat kebelakang hal potensial apa saja yang dapat digunakan dalam mendasari pemikiran dan prinsip kenegaraan.
2. *Implementative causes* ; dalam pemikiran yang telah didapatkan diperlukan penerapan yang aktual dalam menjalankan sebuah kebijakan suatu negara secara komprehensif dan implementasi yang tepat.
3. *Evaluative causes* ; karakteristik yang telah terbentuk memerlukan *maintenance* atau pengawasan dalam keberlangsungan kebijakan suatu negara.

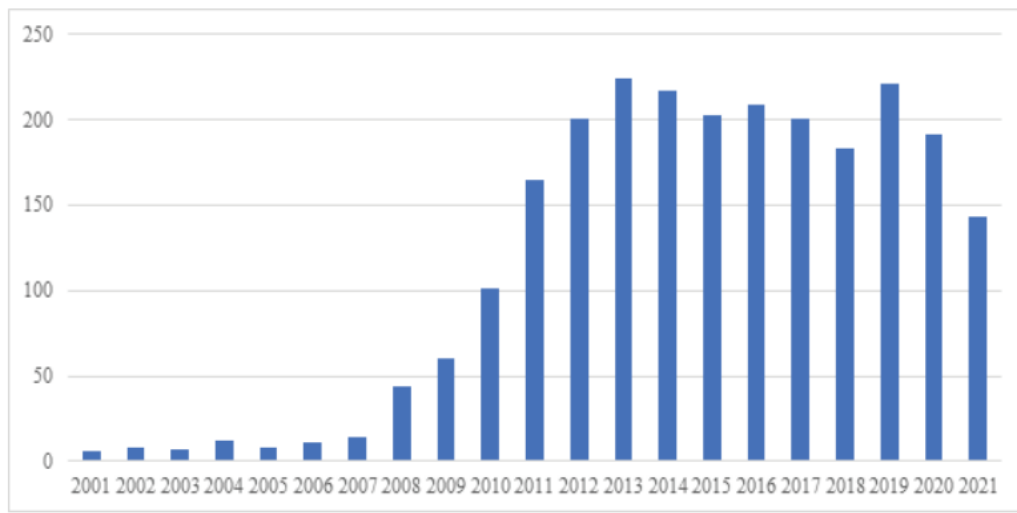
Dari tiga aspek yang memunculkan konsep *strategic depth* akan dijelaskan lebih lanjut lagi secara mendalam. Dimulai dengan adanya pemikiran dan wacana terhadap sebuah alternatif baru bagi kebijakan luar negeri Turki yaitu didasarkan pada kondisi geopolitik Turki yang baru. Diperlihatkan dengan adanya kenyataan peluang Turki dalam berhubungan kerjasama secara dinamisme, aktivisme, ambisi, hingga ekspansi (Tüysüzoğlu, 2014). Seperti yang disampaikan oleh Davutoğlu dalam pidatonya yaitu ;

*“responsibility to form a new and meaningful whole between its **historical depth** and **strategic depth**, and to actualize this whole within **the geographical depth**.”*

Pada statement ini Turki ingin menunjukkan bahwa tujuan dalam *strategic depth* ialah untuk membangun identitas baru bagi Turki dalam urusan global, dan dengan demikian melampaui representasi diri yang dikotomis yang telah melanda pola pikir Turki, yang dapat dikatakan mengalami disonansi kognitif yang diakibatkan oleh diri sendiri (Yeşiltaş, 2013). Lalu pada aspek yang kedua berkaitan dengan penerapan *strategic depth*, yaitu menekankan pada peran dan tingkat aktivisme Turki yang mana sebelumnya beberapa decade Turki kerap kali menunjukkan sikap apatis nya terhadap perubahan dinamika politik internasional. Dengan adanya aktivisme ini dapat menjadi sebuah dorongan bagi Turki dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih teratur dan mengubah Turki menjadi kekuatan besar dalam kawasan (Огузлу, 2012). Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mengkondisikan terhadap pemikiran dan praktik *strategic depth*. Terdapat tiga

imajinasi geopolitik dalam konsep ini, yaitu geopolitik kemalis, geopolitik nasionalis-Turki, dan geopolitik konservatif-Islam (Bilgin, 2007).

Sejak kemunculan konsep ini dalam kebijakan luar negeri Turki, cukup banyak kajian-kajian dari pengamat politik luar negeri terkait dengan perubahan dan kebangkitan dari karakteristik kebijakan luar negeri Turki.



Gambar 2.3 Peningkatan Hasil Pengamatan Konsep “*Strategic depth*”

Source : Google Scholar Data Analytic

Merujuk pada gambar 2.3 bahwa keberhasilan perubahan karakteristik dan peningkatan pengaruh dari konsep *strategic depth* Turki telah berhasil membuat beberapa pengamat serta pengaruh kebijakan luar negeri Turki. Sejak konsep ini dijadikan sebagai salah satu landasan baru bagi Turki dalam menerapkan kebijakan luar negeri, banyak pro dan kontra yang terjadi terutama bagi kondisi politik domestic Turki itu sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara pasti akan selalu mendapatkan kondisi tersebut apabila terdapat suatu pengimplementasian terbaru pada kondisi kebijakan negara. Aras and Fidan (2009) merujuk pada pro dan kontra tersebut Turki jadi terlihat

semakin mendapatkan panggung di kawasan regionalnya maupun di internasional. Terutama pada kondisi hubungan kerjasama regionalnya terhadap NATO. Kondisi yang dialami antara Turki saat ini layaknya duri dalam daging yang apabila diilustrasikan hubungannya dapat saling melukai namun tetap dibutuhkan dalam penopangan struktur keamanan regional. Dengan begitu didalam keanggotaan dan kerjasama NATO sendiri Turki menjadi salah satu anggota yang cukup sering melakukan sebuah kontradiksi dan perbedaan agenda dalam kepentingan yang dimiliki NATO (Kalin, 2009).

2.3 Kontradiksi Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Kepentingan NATO.

Tingkat nasionalis dan kecenderungan kekuatan politik militer Turki saat ini meningkat dibanding dengan beberapa tahun terakhir ini. Hal ini merupakan bentuk dari cerminan gaya kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, ia berhasil membentuk kebijakan-kebijakan luar negeri Turki yang cenderung independen namun memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan militer yang membaik. Pada saat Erdogan menghadapi tantangan politik serta ekonomi yang krusial di dalam negerinya, ia telah mencoba mengambil tindakan inisiatif kebijakan luar negeri, baik itu dari segi kebijakan progress ekonomi Turki maupun peningkatan pengeluaran militer Turki untuk memperkuat kekuatan militer (Grafov, 2022).

Kontradiksi yang ditunjukkan oleh Turki terhadap kepentingan NATO, dapat dikatakan melalui berbagai aspek. Bentuk kontradiksi yang kerap kali terlihat dari kedua pihak ini biasanya cenderung menunjukkan bentuk

independensi dan kebangkitan Turki dalam mengambil keputusan yang berlawanan dengan kepentingan NATO. Dengan melihat kondisi seperti itu Erdogan memanfaatkannya dengan banyak mengerahkan pengaruhnya pada kebijakan dan kepentingan Turki di kancah internasional dan regional. Dimulai pada saat Turki melakukan penolakan terhadap keputusan AS yang ingin menginvasi Irak, dimana pada saat itu Erdogan sudah menjadi perdana menteri. Dengan keputusan tersebut dapat dikatakan Turki terlihat mulai berani mengambil sikap yang berbeda terhadap kepentingan AS di kawasan Timur Tengah (Leffler, 1985).

Beberapa pengamat politik internasional Steven A. Cook dalam bukunya berjudul "Turkey's Strongman Is Weaker Than He Appears" menilai Erdogan dalam memimpin Turki memiliki hubungan dengan barat yang sudah tidak lagi berada di jalan yang sama, dengan kata lain poros kebijakan luar negeri Turki telah bergeser pada poros "baru" yaitu ke "timur-an" atau biasa dikenal dengan islamisme. Meskipun hal ini hanya berupa opini bagi pengamat, namun hal tersebut tidak dapat dibantah oleh fakta yang terjadi di lapangan. Keberpihakan Erdogan sebagai pemimpin Turki menunjukkan dukungannya terhadap umat Muslim di seluruh dunia terutama pada kasus yang terjadi di Palestina. Erdogan secara aktif menunjukkan keaktifannya dalam mendukung umat Muslim diwadah forum internasional pada saat "World Economic Forum" di Davos, Swiss. Turki dengan berani menyatakan bahwa "barbarism that surpasses Hitler" (Minasian, 2003). Perbuatan negara Israel kepada warga palestina seperti layaknya orang barbar, dengan berani menegakkan dukungan

kemanusiaan pada negara muslim sebagai bagian dari anggota aliansi Barat. Secara tidak langsung hal ini membuat forum Barat mendapat tamparan cukup keras terhadap sikap tegas Turki.

Dengan begitu, dapat dikatakan Erdogan di era kepemimpinannya mampu membawa Turki pada keberanian untuk kebangkitan Turki dengan sikap independensinya terhadap NATO. Langkah-langkah yang dilakukan Erdogan sedikit demi sedikit dalam mengambil keputusan telah menunjukkan kontradiksi yang sangat berarti bagi hubungan kerjasamanya pada NATO. Perlu diingat bahwa NATO menganggap Turki sebagai anggota aliansi yang istimewa, terutama pada kondisi geostrategis Turki itu sendiri (Buzan & Diez, 1999).

2.3.1 Pembelian S-400 Rusia.

Keputusan Turki untuk membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 dari Rusia telah menimbulkan banyak kontroversi dan pertanyaan tentang hubungannya dengan NATO, aliansi pertahanan yang telah lama dijalin. Meskipun begitu, kemungkinan terjadinya perpecahan dengan NATO dianggap rendah, karena baik Turki maupun anggota NATO lainnya masih saling tergantung satu sama lain. Pemerintah Turki menganggap pembelian tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan otonomi dan/atau memperkuat posisi tawarannya dalam hubungan dengan sekutu Barat. Namun, harapan tersebut mungkin belum dapat terwujud. Sebaliknya, pembelian S-400 berpotensi membuat Turki semakin bergantung pada Rusia, sementara juga

menimbulkan kebutuhan akan jaminan keamanan dari NATO. Tindakan ini tentu cukup dilematis bagi kondisi hubungan kerjasama antara Turki dengan negara aliansi NATO. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk keputusan ini adalah upaya Presiden Tayyip Erdoğan untuk mengamankan dukungan domestik dengan mengadopsi sikap keras terhadap Amerika Serikat, mencegah kemungkinan tantangan terhadap kepemimpinannya (Habibie, Ozertem, Has, & Demirtepe, 2013).

Kondisi geografis Turki dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua, hal ini disebabkan karena kondisi alam yang berbeda akan membuat kondisi tingkat kepentingan keamanannya ikut berbeda. Dimana Turki wilayahnya hampir 70% perairan maka tentu kerentanan keamanan wilayah mereka bisa dalam dua kondisi alam yaitu perairan dan udara. Selain itu, Turki juga terletak pada kawasan yang rentan dalam gejolak konflik yang mengakibatkan aktivitas militer dari negara lain di kawasan menjadi sangat intens (Sitasi, 2020). Sistem pertahanan yang dimiliki Turki sebelumnya yaitu seperti Stingers, Raider, dan Hawk, sistem ini hanya memiliki jangkauan serang pendek-menengah, tentu juga fasilitas tersebut juga sudah digunakan cukup lama dan menua. Oleh karena itu, tidak salah apabila Turki dikatakan krisis dalam kondisi sistem pertahanan udara berbasis darat yang memadai dan efektif. Dengan luas wilayah 783.562 Km² dan jumlah total 84 juta penduduk Turki yang berada dalam kawasan dengan minim keamanan udara tentu menjadi kan pemerintahan pada saat itu menjadi mengubah prioritas kepentingan negaranya (Bensaid, 2019).

Kurangnya sistem pertahanan udara yang efektif di Turki dirasakan dengan jelas ketika Suriah terjerumus ke dalam perang saudara pada bulan Maret 2011, dimana pada saat itu mengakibatkan kerentanan pada efektifitas keamanan udara yang berada diwilayah tersebut. Kurangnya perhatian AS maupun NATO terhadap Turki sebagai anggota aliansinya menjadikan Turki terkena pengaruh ancaman dari missil balistik dan cruise missil dari arsenaal negara sekitar yang sedang berkonflik (Kasapoğlu & Ulgen, 2018). Pada masa itu, kondisi pertahanan udara Turki mengalami tekanan yang sangat tinggi, yang memerlukan perhatian dan tindakan cepat untuk memperbaiki sistem pengamanan udara di Turki.

Insiden ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk membangun struktur pertahanan udara permanen di negara ini, menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari rudal balistik dan rudal jelajah yang ada di gudang senjata negara-negara tetangga. Berdasarkan pengalaman sebelumnya pada tahun 1990-an dan 2000-an, pihak berwenang Turki kini berpandangan bahwa mereka harus meningkatkan kemampuan pertahanan udara mereka dengan cara yang lebih canggih. Berikut kebutuhan yang diperlukan :

1. Sistem ini akan memberikan perlindungan pertahanan udara yang efektif bagi Turki dari ancaman rudal balistik dan jelajah serta pesawat militer;
2. Set baterai pertama dapat digunakan dan mulai beroperasi dalam waktu singkat setelah penandatanganan perjanjian pembelian;

3. Perusahaan pemasok akan setuju untuk berbagi teknologi dengan Turki untuk memungkinkan produksi bersama sistem, termasuk versi lanjutannya dalam waktu dekat; dan
4. Harganya harus terjangkau.

Dari karakteristik kebutuhan yang diperlukan membuat Turki melirik beberapa perusahaan keamanan militer dari negara – negara lain diluar regional, seperti China, Perancis, hingga Russia. Alokasi kerjasama dan pembahasan dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan keamanan yang diharapkan Turki memerlukan diskusi dan pertimbangan yang cukup panjang. Tidak hanya internal saja melainkan keterlibatan tekanan oleh eksternal seperti NATO pada saat itu menjadi pengaruh pada keputusan dalam pengambilan kebijakan dalam meningkatkan sistem kemananan udara Turki. Perusahaan Cina CPMIEC menawarkan sistem pertahanan udara FD-2000 dengan janji pengiriman lebih cepat dan harga yang lebih murah dibandingkan S-400, Patriot, dan SAMP/T. Namun, sebagian besar sekutu Turki di Barat, terutama AS, menentang pilihan Ankara, mengatakan sistem Tiongkok tidak kompatibel dengan "Perisai Rudal" NATO yang sedang dibangun, termasuk kontribusi besar Turki melalui radar di desa Kürecik dekat Malatya (Egeli, 2018).

Setelah kesepakatan dengan HQ-9 gagal, Erdogan berusaha mencari solusi alternatif untuk memenuhi kepentingan nasional Turki. Pada tahun 2017, dia bertemu dengan Putin untuk membahas rencana kerjasama dalam pembelian sistem pertahanan udara S-400. Perusahaan Rusia Rosoboroneksport memperkenalkan sistem rudal S400 "Tri-Umf" kali ini.

Pihak berwenang Turki dan Rusia duduk bersama untuk melakukan negosiasi, yang kemudian menghasilkan penandatanganan kesepakatan (Erşen, 2016). Kesepakatan itu pun tercapai pada bulan Desember 2017, dan pengiriman armada pertama S-400 dimulai pada tahun berikutnya.

S-400 battalion components:

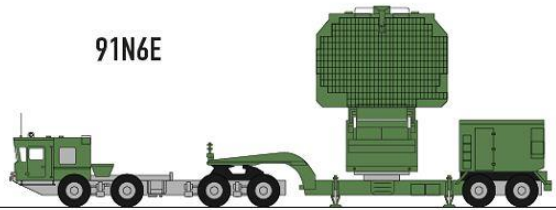
Command-and-control equipment

55K6E



Mobile command post on Ural-532301

91N6E



Big Bird acquisition and battle management radar

Up to eight fire units, including

92N6E



Grave Stone engagement and fire control radar

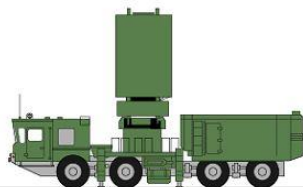
5P85TE2/5P85SE2



Launchers (up to 12) with 4 missiles each

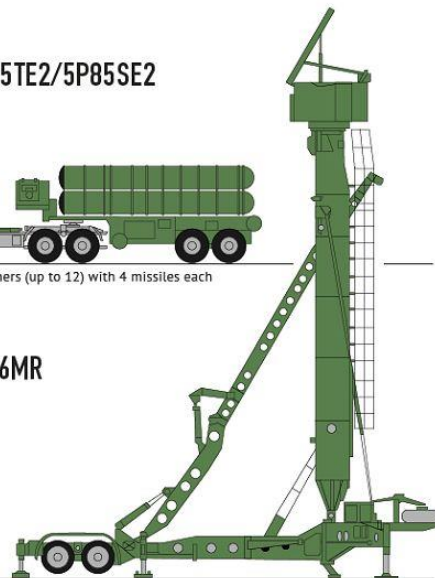
Optional equipment:

96L6E



all-altitude acquisition radar

40V6MR



mobile mast system

Gambar 2.4 Komponen Balistik S-400

Source :

https://armyrecognition.com/russia_russian_missile_system_vehicle_uk/s-400_triumf_sa-21_growler_missile_russia_air_defense_system.html

Gambar 2.4 yang di tunjukkan diatas merupakan bentuk detail dari sistem keamanan S-400 yang digunakan Rusia dan dibeli oleh Turki. Sistem kendali

dan komando rudal S-400, disebut *55K6E Command and Control System*, diangkut oleh kendaraan Ural532301. Fungsinya adalah mengawasi operasi baterai S-400, memantau pergerakan udara, dan mendeteksi ancaman terhadap S-400 di udara. Sistem ini telah digunakan pada generasi rudal sebelumnya dan terbukti dapat terintegrasi dengan baik dengan sistem pertahanan lain seperti SA-21, SA-23, dan S-300 (Army Technology, 2018). Dengan kapasitas dari komponen keamanan yang dimiliki S-400, diharapkan dapat kompetible dengan kondisi kebutuhan serta keamanan udara Turki.

Pembelian S-400 menimbulkan sejumlah kekhawatiran mulai dari aspek teknis kerja sama militer dalam NATO sampai dengan pertimbangan politik yang jauh lebih luas lagi. Bahkan bagi beberapa pihak berpendapat jika masalah S-400 meningkatkan kemungkinan bahwa Rusia dapat mengambil keuntungan dari gesekan AS dan Turki untuk merusak aliansi NATO. Pemerintah AS telah memberi tahu Turki bahwa pembelian S-400 akan berdampak negatif pada hubungan AS-Turki dan peran Turki dalam NATO (Department of Defense US, 2018). Berikut konsekuensi yang dapat diterima oleh Turki kapan saja :

1. Sanksi potensial berdasarkan Pasal 231 dari Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).
2. Risiko terhadap partisipasi Turki dalam Program F-35 Joint Strike Fighter (JSF) (baik akuisisi pesawat maupun kerja sama industri).

3. Risiko terhadap potensi transfer senjata AS di masa depan ke Turki, dan risiko kehilangan kerja sama industri pertahanan bilateral yang lebih luas.
4. Pengurangan interoperabilitas NATO.
5. Pengenalan kerentanan baru dari meningkatnya ketergantungan Turki pada Rusia, termasuk entitas pertahanan Rusia yang terkena sanksi, untuk peralatan militer yang canggih.

Belum dapat dipastikan apakah AS akan benar-benar menjatuhkan sanksi yang disebutkan di atas sebagai tanggapan atas pembelian sistem S-400 Rusia oleh Turki. Namun perlu diingat bahwa sanksi yang disebutkan di sini tidak hanya akan merusak kepentingan Turki, tetapi juga kepentingan AS dengan cara melumpuhkan kapasitas pertahanan dan kemampuan operasional Aliansi Atlantik Utara secara keseluruhan, di mana Turki merupakan kekuatan besar yang bertetangga dengan salah satu wilayah paling bergejolak di dunia (Tol & Goren, 2017). Oleh karena itu, upaya untuk melemahkan kapasitas militer Turki dan ekonominya hanya akan bermain di tangan saingan dan musuh-musuh Turki, khususnya, dan NATO, secara umum, sehingga menghasilkan situasi yang kalah-kalah bagi kedua belah pihak di dalam aliansi.

Berdasarkan dampak yang telah dijelaskan bahwa fenomena tersebut dapat menggambarkan seberapa besar tekanan yang diberikan oleh NATO atas tindakan independensi Turki. Hal ini tentu, dapat mengancam stabilitas

keamanan dan gangguan dalam penggunaan sistem keamanan regional NATO itu sendiri. Gambaran kondisi ini layaknya duri dalam daging.

2.3.2 Patroli Militer Turki di Wilayah *Aegean Sea*.

Kawasan Mediterania Timur kerap kali menjadi wilayah persimpangan peradaban, sejarah, dan geopolitik. Dalam konteks krisis Rusia-Ukraina di perbatasan timur Eropa, ketegangan semakin meningkat antara dua sekutu NATO, Yunani dan Turki. Mereka berselisih terkait klaim wilayah dan udara di Laut Aegea. Laut Aegea memiliki nilai sejarah yang besar karena menjadi tempat lahirnya peradaban Yunani dan Turki Barat, serta memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa (Gros, 1977).



Gambar 2.5 Peta Wilayah Perbatasan Laut Aegea, Turki, dan Yunani.

Source : *The Washinton Post*

Pada gambar 2.5 Laut Aegea merupakan zona wilayah yang strategis bagi kedua negara yaitu Turki dan Yunani. Sejak awal abad ke-20, setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, batas antara kedua negara ditetapkan melalui perjanjian internasional. Namun, status banyak pulau di Laut Aegea masih belum jelas, menyebabkan konflik berkelanjutan tentang kepemilikan dan kendali. Sejak tahun 1970-an, Athena dan Ankara terlibat dalam perselisihan maritim di Laut Aegea, dengan klaim bersaing atas batas wilayah. Akar masalah dalam krisis Laut Aegea ini meliputi permusuhan sejarah, status demiliterisasi pulau-pulau di Aegea Timur, sengketa tentang batas perairan dan Landas Kontinen, serta pelanggaran wilayah udara. Perselisihan ini telah menyebabkan serangkaian insiden dan peningkatan militer, memperburuk ketegangan antara kedua negara (Van Dyke, 2005).

Ketegangan antara kedua negara meningkat belakangan ini karena beberapa faktor, seperti penemuan cadangan gas alam yang besar di wilayah tersebut dan krisis pengungsi di Eropa. Kehadiran gas alam membuat situasinya semakin rumit, dengan Turki berpendapat bahwa pulau-pulau seperti Kastellorizo harus dikuasainya karena dekat dengan ladang gas tersebut.



Gambar 2.6 Titik Lokasi Pulau Kastellorizo

Source : Research Gate

Gambar 2.6 yang ditampilkan menunjukkan salah satu pulau yang menjadi pusat sengketa, yaitu Kastellorizo, yang terletak di Laut Mediterania timur, hanya 2 kilometer dari pantai Turki. Pulau ini merupakan bagian dari kepulauan Dodecanese. Italia menyerahkan Kastellorizo kepada Yunani pada tahun 1947 sesuai dengan Perjanjian Paris. Namun, Turki terus-menerus mengklaim kepemilikan pulau ini dengan alasan kedekatannya dengan pantai Turki dan wilayah landas kontinen Turki menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Titik perselisihan lainnya adalah pulau Imia, yang tidak berpenghuni dan dikenal sebagai Kardak dalam bahasa Turki. Pulau ini terletak di antara Kalymnos, Yunani, dan pantai Turki. Krisis meletus pada tahun 1996, ketika

kedua negara mengirim pasukan militer ke wilayah tersebut (Pratt & Schofield, 1996). Meskipun krisis itu berhasil diselesaikan melalui diplomasi, sengketa atas kepemilikan pulau ini masih berlanjut. Krisis pengungsi juga menjadi faktor yang memperumit kondisi dari situasi di wilayah tersebut. Dimana laut Aegea merupakan jalur bagi para pengungsi dan migran yang ingin menuju Eropa. Tentu hal ini dapat menimbulkan tuduhan terhadap kedua negara yang berselisih tersebut sebagai upaya eksploitasi terhadap krisis tersebut.

Selain itu, yang kerap terjadi yaitu pada tuduhan adanya pelanggaran batas wilayah laut maupun udara melalui ancaman patrol dan pelatihan militer baik dari Ankara maupun Athena. Hal ini nanti akan dapat emicu dan menumbuhkan persepsi satu sama lain sebagai saingan. Persepsi ini tentu akan menjadi prospek yang kurang baik bagi kedua negara tersebut. Lalu, baru-baru ini muncul sebuah insiden yang menjadi bahan bakar bagi konflik yang telah lama redup ini. Terjadi pada bulan Agustus 2022, dikutip dari kementerian pertahanan Turki sendiri mengklaim bahwa salah satu sistem keamanan udara S-300 milik Yunani telah menargetkan radar pesawat AWACS NATO dan F-16 Turki selama latihan militer yang dilakukan oleh pihak militer Turki (Vassalotti, 2011). Erdogan menuduh bahwa Yunani melakukan hal tersebut untuk menunjukkan determinasi militernya mampu memberikan pengaruh signifikan pada perbatasan wilayah laut Aegea, tentu hal ini telah menghidupkan kembali permusuhan lama yang terjadi antara kedua negara tersebut.

Perjanjian bersejarah penting seperti Perjanjian Perdamaian Lausanne tahun 1923, Konvensi Montreux tahun 1936, dan Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1947 telah menetapkan batas-batas wilayah dan status demiliterisasi untuk beberapa pulau di Laut Aegea. Namun, perbedaan dalam penafsiran perjanjian-perjanjian tersebut terus memicu konflik (Falk, 2022). Sengketa tentang luasnya perairan teritorial di Laut Aegea sudah berlangsung lama. Sejak tahun 1936, baik Yunani maupun Turki telah mengklaim perairan teritorial hingga 6 mil laut dari pantai. Meskipun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengizinkan negara-negara untuk memperluas perairan teritorial hingga 12 mil laut, masalah perluasan di luar 6 mil laut di Laut Aegea masih diperdebatkan. Ini bisa sangat memengaruhi batas wilayah laut dan hak akses ke laut lepas, yang ditolak oleh Turki dan berpotensi menyebabkan konflik (Stamouli, 2022). Sementara, Sengketa utama antara Yunani dan Turki berpusat pada landas kontinen Aegea setelah ditemukannya cadangan minyak dan gas alam di wilayah tersebut. Kedua negara belum sepakat tentang batas-batas wilayah, sehingga klaim atas area potensial untuk pengeboran saling tumpang tindih. Persaingan untuk menguasai sumber daya alam ini meningkatkan ketegangan, mendorong kedua negara untuk melakukan survei seismik dan eksplorasi di perairan yang dipersengketakan. Ketiadaan kesepakatan yang jelas mengenai batas landas kontinen semakin memperumit sengketa ini (Güner, 2004).

Dengan meningkatnya ketegangan antara Yunani dan Turki di wilayah Laut Aegea ini memberikan dampak yang berkelanjutan dan luas, baik itu

secara regional maupun internasional. Sebagai anggota NATO, Yunani dan Turki diharapkan untuk bekerja sama dan menjaga solidaritas dalam aliansi ini. Namun, meningkatnya krisis di Laut Aegea telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara anggota NATO lainnya bahwa konflik internal ini bisa merusak persatuan aliansi. Ketika NATO menghadapi ancaman dari luar, seperti krisis Rusia-Ukraina, perpecahan internal bisa melemahkan respons bersama terhadap tantangan yang dihadapi (Heraclides, 2011). Krisis di Laut Aegea juga menambah tantangan keamanan di wilayah Mediterania Timur. Kegiatan militer dan latihan oleh Yunani dan Turki meningkatkan risiko konflik tidak disengaja atau kesalahan perhitungan yang bisa berakibat besar. Situasi ini tidak hanya mengancam keamanan dan stabilitas kedua negara, tetapi juga bisa melibatkan aktor regional lain dan memperburuk ketegangan geopolitik di wilayah tersebut (Yavaş, 2013).

Krisis ini memberi peluang kepada aktor-aktor asing, terutama Rusia, untuk mendapatkan pengaruh di Mediterania Timur. Yunani dan Turki rentan terhadap upaya pengaruh Rusia, dan ketegangan yang meningkat antara keduanya bisa mengganggu keterpaduan NATO dan Uni Eropa. Ini bisa membuat sulit bagi mereka untuk bekerja sama dalam kebijakan keamanan. Krisis di Laut Aegea juga menimbulkan risiko bagi hubungan ekonomi antara Yunani dan Turki. Meskipun perdagangan antara keduanya telah tumbuh pesat, ketegangan atas batas laut bisa mengganggu perdagangan. Industri pariwisata, yang sangat penting bagi kedua negara, juga bisa terdampak karena krisis ini berkaitan dengan geopolitik, yang mungkin menghalangi para wisatawan dan

merusak stabilitas ekonomi di wilayah tersebut (Mann, 2001). Dengan demikian pengaruh kontradiksi kebijakan yang terjadi antar sesama sekutu aliansi baik Turki maupun Yunani dapat memberikan kerugian bagi hubungan kerjasama dan keamanan regional bagi NATO itu sendiri.